

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

Kiagus M Dimas Cattur Raihan¹ Muhammad Fahmi² Gumulya Sonny Marcel Kusuma³

Jurusankontrol, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang,
Sumatera Selatan

Corresponding email: fahmisulai@yahoo.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Article History</p> <p>Submission : 01/11/2025 Review : 10/11/2025 Revised : 15/11/2025 Accepted : 19/11/2025 Published : 26/11/2025</p>	<p><i>The research problem formulation is how the implementation of the government's internal control system improves the quality of financial reports of the city of Palembang (case study at the Regional Revenue Agency of the City of Palembang). The aim is to analyze the implementation of the government's internal control system to enhance the quality of financial reports of the city of Palembang. This research is associative, aimed at identifying the relationship between two or more variables and their effects. The independent variable is the internal control system, and the dependent variable is the quality of financial reports. The population of the study consists of employees of the Regional Revenue Agency of the City of Palembang. The number of respondents was 4 heads of departments from the regional revenue agency of Palembang city, which consisted of the BPHTB & PBB department, other local tax departments, the collection department, planning and development of local revenue, as well as the control and local tax database department. Primary data is needed as the basis for analysis, while the data collection technique used is a questionnaire. The analysis method used is qualitative analysis. The results of the study indicate that the Internal Control System at the Regional Revenue Agency of Palembang City is functioning well and is capable of improving the quality of its financial reports.</i></p>
<p>Keywords <i>Government Internal Control System Quality of Financial Reports</i></p>	<p>ABSTRAK Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan sistem pengendalian internal pemerintah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Kota Palembang (studi kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang). Tujuannya adalah menganalisis penerapan sistem pengendalian internal pemerintah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan Kota Palembang. Penelitian ini bersifat asosiatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara dua variabel atau lebih beserta pengaruhnya. Variabel independennya adalah sistem pengendalian internal, dan variabel dependennya adalah kualitas laporan keuangan. Populasi penelitian ini adalah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang. Responden berjumlah 4 kepala dinas dari Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang, yang terdiri dari dinas BPHTB & PBB, dinas pajak daerah lainnya, dinas penagihan, perencanaan dan pengembangan pendapatan</p>

	daerah, serta dinas pengendalian dan basis data pajak daerah. Data primer diperlukan sebagai dasar analisis, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang berfungsi dengan baik.
--	---

PENDAHULUAN

Pengendalian internal merupakan sistem atau prosedur yang ada dalam suatu organisasi untuk menjaga proses kegiatan operasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan guna pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Pengendalian internal berisi rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya (Martini, et al., 2019).

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Pengendalian internal yang memadai diperlukan untuk mengkoordinasi dan mengawasi jalannya aktivitas instansi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian instansi seperti penyelewengan, kecurangan, pemborosan, dan pencurian baik dari pihak internal maupun pihak eksternal instansi dalam menilai instansi serta untuk mengevaluasi dan mengambil tindakan perbaikan dalam mengantisipasi kelemahan instansi.

Kasus fraud korupsi di Indonesia terjadi semakin merata di tingkat pemerintahan pusat sampai dengan daerah dan BUMN/BUMD, dari level eksekutif/CEO, aparatur negara, eksekutif sampai legislatif dan yudikatif. Menurut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 BPK yang memuat 15.674 permasalahan sebesar Rp 18,37 triliun ternyata sebanyak 7.020 permasalahan atau 45%-nya akibat kelemahan Sistem Pengendalian Internal (Achmad, 2022).

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tentang Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Indonesia masih menggambarkan hasil yang belum konsisten, sehingga penelitian lebih lanjut untuk masalah ini masih perlu dilakukan. Untuk itulah peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang (Studi kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Kota Palembang (Studi kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang).

Kajian Pustaka

Sistem Pengendalian Internal

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan Sistem Pengendalian Internal sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu yang dijalankan oleh orang-orang dari setiap jenjang organisasi yang diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan antara pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi (Mulyadi, 2013: 180).

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Nur Fadhillah (2019) SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Menurut (Winarto 2020) untuk dapat mencapai tujuan pengendalian internal, suatu sistem harus memenuhi enam prinsip dasar yang meliputi:

- 1) Pemisahan fungsi, tujuan utama pemisahan fungsi untuk menghindari dan melaksanakan pengawasan segera atas kesalahan dan ketidakberesan.
- 2) Prosedur pemberian wewenang, tujuan prinsip ini adalah untuk menjamin bahwa transaksi telah disetujui oleh orang yang berwenang.
- 3) Prosedur dokumentasi, dokumentasi yang sangat penting untuk menciptakan sistem pengendalian internal yang efektif.
- 4) Prosedur dan catatan akuntansi, tujuan pengendalian ini adalah agar dapat disiapkannya catatan-catatan akuntansi yang diteliti secara cepat dan tepat serta data akuntansi dapat dilaporkan kepada pihak yang menggunakan secara tepat waktu.
- 5) Pengawasan fisik, berhubungan dengan penggunaan alat-alat mekanis dan elektronis dalam pelaksanaan dan pencatatan transaksi.
- 6) Pemeriksaan internal secara bebas, menyangkut perbandingan antara catatan aset dengan aset yang betul-betul ada.

Kualitas Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 mendefinisikan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP,

adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Kualitas laporan keuangan adalah informasi yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Semakin besar tingkat pengungkapan yang diinformasikan semakin baik juga tingkat pemahaman akan kinerja dari laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan mengandung unsur kelengkapan informasi, ketepatwaktuhan informasi, informasi yang andal atau dapat dipercaya serta dapat dibandingkan dan kelengkapan informasi pada laporan keuangan. Karakteristik kualitas laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan, antara lain Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami.

Terdapat delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun 2010, yaitu: Basis Akuntansi; Nilai Historis (*Historical Cost*); Realisasi (*Realization*); Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*); Periodisitas (*Periodicity*); Konsistensi (*Consistency*); Penyajian Wajar (*Fair Presentation*). Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Neco Fransisca, dkk (2016) yang berjudul Sistem Pengendalian Intern Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh kelemahan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kelemahan sistem

pengendalian akuntansi dan pelaporan serta kelemahan struktur pengendalian internal memiliki efek negatif, yang berarti bahwa tingkat kerentanan menurunkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah agar lebih baik dan dapat diandalkan. Sebaliknya, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Ini berarti bahwa semakin tinggi kelemahan sistem, semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil keseluruhan membuktikan bahwa setiap kelemahan dalam sistem pengendalian internal secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Jadi hasil penelitian ini membuktikan bahwa kelemahan sistem pengendalian internal adalah hal yang penting untuk dicatat agar lebih banyak dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas bagi pemerintah daerah.

Sri Rahayuningsih, dkk (2022) menyatakan Sistem Pengendalian Internal (SPI), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) berpengaruh terhadap Keandalan Kualitas Laporan Keuangan Kota Palembang. Penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota palembang selaku entitas pelaporan. Responden terdiri dari pegawai di bidang akuntansi, pembendaharaan daerah, pengelolaan aset dan bidang anggaran daerah. Hasil menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan dipengaruhi adanya penerapan SPI, SAKD, dan IT sebesar 93,9%. Ketiga faktor ini juga berdampak pada keandalan laporan keuangan.

Penelitian yang di lakukan oleh Rita Martini, dkk (2022) menyatakan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah adalah sistem pengendalian internal (SPI). Kajian ini bertujuan mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Palembang. Hasil kajian menyimpulkan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Florencia dan Suji (2023) berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Cimahi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta mengkaji implementasi SIPD Reverse di Kota Cimahi. Menurut hasilnya, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akurasi pelaporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Vio Nanda (2024) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak signifikan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Namun, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini menekankan pentingnya kepatuhan penuh terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan dan

adanya sumber daya manusia yang terampil untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di organisasi pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri, dkk (2024) menyatakan bahwa penerapan sistem pengendalian intern di Pengadilan Negeri Gorontalo pada bagian keuangan dinilai dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Namun masih perlu dikembangkan lagi penerapannya karena baru saja diterapkan tahun lalu. Pada pembahasan peneliti telah mewawancara beberapa informan mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam sistem pengendalian intern yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta yang terakhir yaitu unsur pemantauan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Asosiatif.

Penelitian dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang yang berlokasi di Jalan Merdeka No. 21, Kecamatan. 19 Ilir, Kelurahan. Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30131, Indonesia. Populasi dalam penelitian ini seluruh Karyawan Bapenda Kota Palembang. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang PBB dan BPHTB, Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, Kepala Bidang Penagihan, Perencanaan dan Pembinaan Pendapatan Daerah, Kepala Bidang Pengendalian dan Basis Data Pajak Daerah.

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sampel data primer yang di dapat dari kuisioner dan wawancara yang disebarluaskan kepada responden yang menjadi sampel. Teknik pengumpulan data melalui kuisioner, wawancara dan observasi. Metode analisis yang dipakai yaitu analisis kualitatif yaitu menggunakan wawancara dan observasi, studi literatur dan sumber yang bermacam-macam serta dilakukan secara terus menerus. Tahapan analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Menyebarluaskan kuisioner dan memperoleh data, (2) Menganalisis data dan kuisioner, dan (3) Membuat Kesimpulan terhadap data dan kuisioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terdiri dari lima unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Lingkungan pengendalian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang sudah berjalan dengan baik, dapat dilihat dengan sesuaiannya kebutuhan dan juga pembagian tanggungjawab yang jelas di dalam lembaga pemerintah. Dalam mewujudkan pengendalian internal yang baik juga Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang menerapkan unsur-unsur integritas dan nilai etika. Hal ini dapat dilihat dengan adanya peraturan peraturan yang ditetapkan oleh kepala badan / bidang berupa tata cara kepegawaian mengenai etika, perilaku dan tanggung jawab yang jelas.

Penilaian risiko pada Bapenda Kota Palembang sudah baik. Hal ini ditunjukkan bahwa Bapenda Kota Palembang telah mampu menilai risiko-risiko terkait aktivitas yang dilakukan oleh Bapenda. Risiko yang dihadapi antara lain kemungkinan dapat terjadi

kesalahan pelaporan keuangan atau aset, adanya kemungkinan ketidaksesuaian pencatatan atas jumlah pengeluaran dengan pertanggung jawaban yang masuk dimiliki oleh Bapenda karena kurang update data.

Aktivitas pengendalian yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang ini antara lain adanya penjabat tinggi atau senior yang mengawasi mekanisme pada Bapenda terhadap rencana yang telah disusun, diberikan pelatihan dan dukungan sarana prasarana lainnya dalam menjalankan tugas, disusunnya transaksi pengendali yang menjadi alat untuk mencocokkan jumlah-jumlah transaksi yang dibuat, adanya aktivitas pemeriksaan dan pencatatan terhadap akses dokumen, adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab sesuai fungsi akuntansi khususnya baik dalam pencatatan penyusunan laporan keuangan.

Kegiatan pengendalian internal pada Bapenda Kota Palembang dari segi informasi dan komunikasi bisa dikatakan telah dilaksanakan dengan baik. Setiap aktivitas dari Bapenda itu memiliki catatan, laporan guna menjadi informasi yang dapat dikomunikasikan dengan baik di antara para pegawai Bapenda. Informasi tersebut terkait dengan bukti transaksi dan laporan terhadap transaksi yang dilakukan di Bapenda, adanya pengkomunikasian bukti transaksi dan laporannya terhadap penjabat dan pihak yang berwenang. Tetapi pada bidang PBB dan BPHTB terkadang pemberian informasi yang berkaitan dengan laporan dilakukan kurang tepat waktu karena kurangnya sumber daya manusia sehingga informasi dan komunikasi yang telah dilaksanakan kurang efektif.

Pemantauan juga dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang untuk meminimalisir penyimpangan dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi secara dini. Penerapan pemantauan pada Bapenda Kota Palembang sejauh ini sebagian besar sudah berjalan dengan baik, seperti sudah diterapkannya kegiatan pengelolaan rutin, pembandingan, rekonsiliasi. Entitas juga sudah menerapkan evaluasi yang diselenggarakan secara terpisah melalui penilaian sendiri, review, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian internal yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah atau eksternal.

Kualitas untuk laporan keuangan pada Bapenda Kota Palembang sejauh ini sudah berjalan dengan sangat baik. Kualitas untuk laporan keuangannya bisa bagus dikarenakan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari tahun 2010 sampai tahun 2023, yang artinya yaitu dipungut laporan keuangannya sendiri dan ditentukan oleh satuan kerja perangkat daerah (skpd) sehingga bisa dibentuk laporan keuangan kota palembang yang saat ini sudah berjalan dengan baik.

KESIMPULAN

Sistem Pengendalian Internal pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang sudah cukup baik, dapat dilihat dari Lingkungan Pengendalian yang menerapkan unsur-unsur integritas dan nilai etika. Telah mampu menilai risiko-risiko terkait aktivitas yang

dilakukan Prosedur pembagian tugas yang sangat jelas. Setiap aktivitas dari Bapenda juga memiliki catatan, laporan guna menjadi informasi yang dapat dikomunikasikan dengan baik di antara para pegawai Bapenda. Penerapan pemantauan sudah berjalan dengan baik, seperti sudah diterapkannya kegiatan pengelolaan rutin, pembandingan dan rekonsiliasi.

Hal ini sejalan dengan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama tahun 2010 sampai tahun 2023, yang artinya yaitu dipungut laporan keuangannya sendiri dan ditentukan oleh satuan kerja perangkat daerah (skpd) sehingga bisa dibentuk laporan keuangan kota palembang yang saat ini sudah berjalan dengan baik. Maka dapat ditarik simpulan bahwa Sistem Pengendalian Internal pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang sudah berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan Kualitas Laporan Keuangannya.

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait dengan hasil dari penelitian diatas adalah bagi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang Diharapkan pimpinan BAPENDA dapat terus menjaga serta meningkatkan komitmen yang lebih baik lagi kedepannya. Sistem pengendalian internal yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang diharapkan dipertahankan dan bahkan lebih ditingkatkan sehingga dalam pencapaian tujuan bisa lebih optimal. Perlu adanya perhatian khusus pada bidang PBB dan BPHTB, seperti seminar pelatihan atau penambahan pegawai agar informasi dan komunikasi dapat berjalan dengan efektif. Pada bidang pengendalian dan basis data yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang, seperti belum terdapat akses web milik bapenda yang lebih terinci, yang bertujuan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses visi, misi, struktur organisasi, serta laporan pertanggungjawaban dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad .(2022). Memperkuat Pengendalian Internal Pemerintah. Diakses pada 16 Juni 2025, dari <https://news.detik.com/kolom/d-6367819/memperkuat-pengendalian-internal-pemerintah>.
- Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan. IHPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019. Diakses pada 17 Juni 2025, dari https://www.bpk.go.id/assets/files/otherpub/2020/otherpub__2020_1603677805.pdf
- Florencia & Suji. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Cimahi. Indonesian Accounting Research Journal Vol. 4, No. 1, October 2023, pp. 1 – 8.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang. (2024).
- Mulyadi. (2013). Akuntansi Biaya. Yogyakarta: Salemba Empat.

- Neco Fransisca, Aris Eddy, dan Dewi Saptantinah. (2016). Sistem Pengendalian Intern Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Syariah Paper Accounting FEB UMS. ISSN 2460-0784,
- Nur Fadhillah. (2019). Komponen-komponen Struktur Pengendalian Intern (SPI). Diakses 15 Juni 2025, dari <https://e-akuntansi.com/komponen-komponen-struktur-pengendalian-intern-spi/>
- Pemerintah Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2003. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Rita Martini. (2022). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang: Dari Aspek Sistem Pengendalian Internal. Jurnal Ekonomi, Bisnis, Akuntansi dan Sistem Informasi (EKSiSTANSI) Vol. 11, No. 1, Januari - Juni 2022, 1420-1427.
- Sujarweni. (2017). Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sri Rahayuningsih, Maria Maria dan Darul Amri. (2022). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Kota Palembang. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Vol. 1 No. 3, November 2022: 90-95.
- Sri Devianti, Hartati Tulib dan Mulyani Mahmud. (2024). Analisis Sistem Pengendalian Intern dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Mahasiswa Akuntansi, Volume 2 No. 4 Maret 2024 Hal. 412-423.
- Tanzil. (2017). Memahami Keterbatasan Pengendalian Internal. Diakses 17 Juni 2025, dari <https://jtanzilco.com/blog/detail/841/slug/memahami-keterbatasan-pengendalian-internal>
- Vio Nanda. (2024). The Influence Of Internal Control Systems, Implementation Of Government Accounting Standards, And Human Resource Competence On Financial Report Quality. Jurnal Akuntansi dan Auditing Volume 21/No. 1 Tahun 2024: 24-38

- Wiratna Sujarweni. (2014). Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi (Cetakan Pertama). Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wiratna Sujarweni. (2018). Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wiratna Sujarweni. (2020). Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah dipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.